



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2019



**KANTOR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
JLN.CILIK RIWUT KM.3,5 PALANGKA RAYA
KODE POS 73112 TELP.(0536) 3221946, 3222986
EMAIL : DISTAMBENPROVKALTENG@GMAIL.COM**



LATAR BELAKANG

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

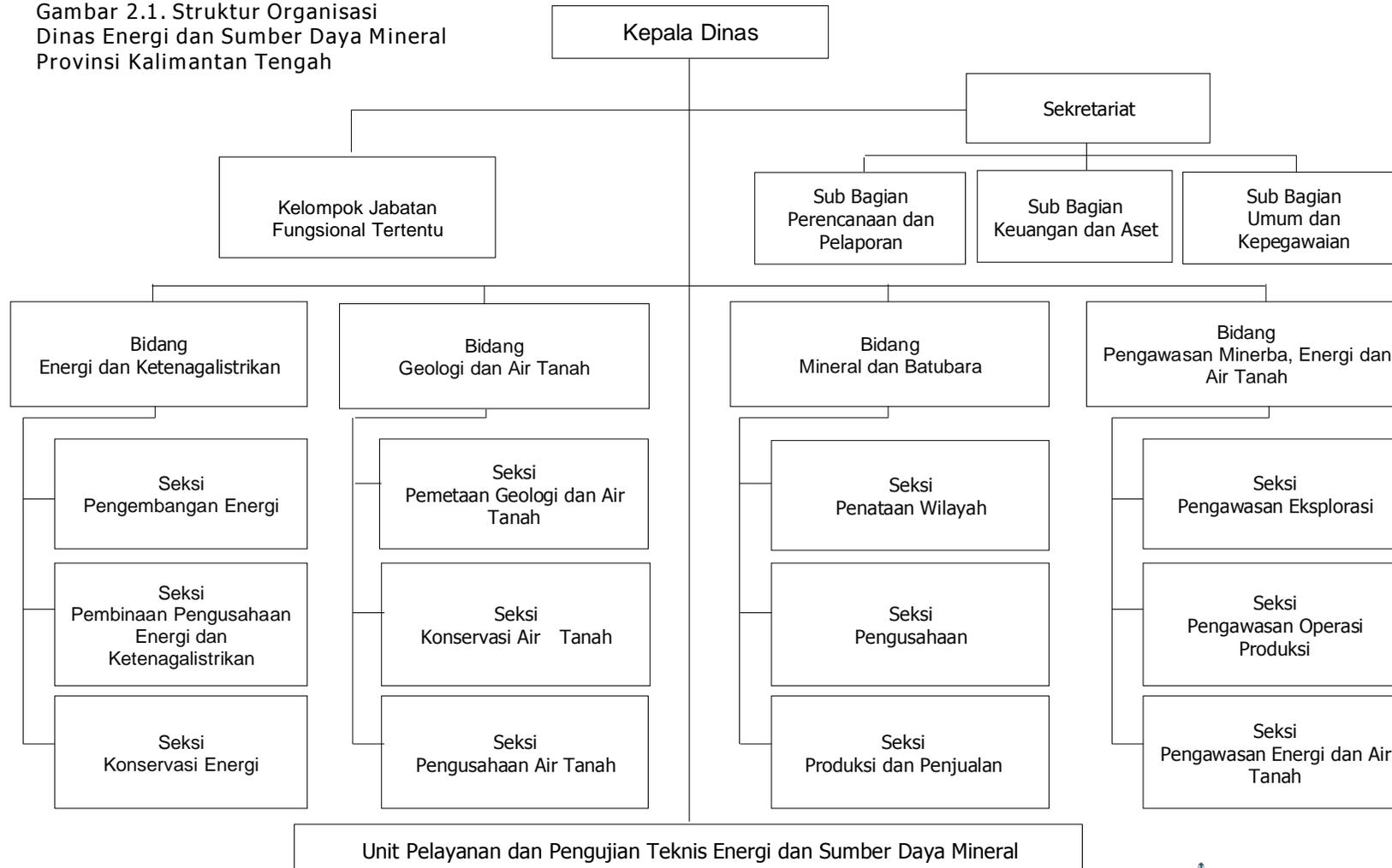
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Gambar 2.1. Struktur Organisasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah



VISI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**“KALIMANTAN TENGAH MAJU, MANDIRI DAN ADIL UNTUK
KESEJAHTERAAN SEGENAP MASYARAKAT MENUJU
KALIMANTAN TENGAH BERKAH”**

**(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan
Harmonis)**



Peran DESDM dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator Kinerja
Misi 2: Percepatan Pembangunan Infrastruktur				
Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatkan Konektivitas antar Daerah	Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Infrastruktur Dasar	Pemerataan Aksebitias Wilayah	Rasio Desa Berlistrik (%) Rasio Elektrifikasi (%)
Misi 7: Peningkatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam				
Terpenuhinya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan	Mewujudkan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik dan Benar (Good Mining Practice)	Pengelolaan Pertambangan (IUP) yang menerapkan Good Mining Practice (GMP)	Terlaksananya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Good Mining Practice (GMP) (GMP)	Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang menerapkan Good Mining Practice (GMP)



GAMBARAN HASIL SAKIP DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- 1. Perencanaan Kinerja**
- 2. Pengukuran Kinerja**
- 3. Pelaporan Kinerja**
- 4. Evaluasi Internal**
- 5. Capaian Kinerja**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) PD Tahun 2018 salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dari hasil penilaian tersebut mendapat nilai 69,86 dengan kategori B (Baik) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.



**PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- 1. Meningkatnya Konektivitas antar Daerah.
- 2. Mewujudkan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik dan Benar (*Good Mining Practice*)

RPJMD

Sasaran Strategis:

- 1. Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.
- 2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- 3. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
- 4. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT.
- 5. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan.

Indikator Kinerja Utama:

- 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba.
- 2. Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta.
- 3. Rasio elektrifikasi.
- 4. Rasio desa berlistrik.
- 5. Kapasitas terpasang PLTS tersebar.
- 6. Kapasitas terpasang PLTS terpusat.
- 7. Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).

Eselon II / Renstra

Bidang Energi dan Kelistrikan

Bidang Geologi dan Air Tanah

Bidang Mineral dan Batubara

Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah

Eselon III

Sasaran Strategis:

- 1. Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
- 2. Melaksanakan Upaya-Upaya Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT.

Indikator Kinerja Utama:

- 1. Rasio elektrifikasi.
- 2. Rasio desa berlistrik.
- 3. Kapasitas terpasang PLTS tersebar.
- 4. Kapasitas terpasang PLTS terpusat.

Sasaran Strategis:

- 1. Melaksanakan peningkatan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.
- 2. Melaksanakan Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Indikator Kinerja Utama:

- 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba.
- 2. Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta.

Sasaran Strategis:

- 1. Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.
- 2. Melaksanakan Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Indikator Kinerja Utama:

- 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba.
- 2. Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta.

Sasaran Strategis:

- 1. Melaksanakan sosialisasi dan pengawasan pertambangan bagi pelaku usaha pertambangan.

Indikator Kinerja Utama:

- 1. Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).



Program:

1. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.
2. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Kegiatan:

1. Penyusunan Perda RUED
2. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
3. Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (Pembangunan PLTS)
4. Pembuatan FS dan DED PLTMH
5. Pembangunan Lampu Penerangan Jalan
6. Pemeliharaan dan Pembenahan PJU dan JTM
7. Pembuatan Peta Informasi Pembangunan Listrik Desa
8. Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat
9. Penunjang Dana Alokasi Khusus
10. Rapat dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah
11. Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Skala Kecil Baru Terbarukan (DAK)
12. Pembangunan PLTS Terpusat Bersumber Dana APBD
13. Verifikasi Desa Belum Berlistrik untuk mendukung Rasio Elektrifikasi di Kalteng
14. Sosialisasi dan Fasilitasi Dalam Rangka Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi di Kalimantan Tengah

Program:

1. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi
2. Penataan Wilayah
3. Peningkatan Informasi Bidang Geologi

Kegiatan:

1. Survey Potensi Bahan Galian
2. Survey Potensi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
3. Survey Potensi Bahan Galian Mineral Wilayah Pesisir dan pantai
4. Pemetaan Hidrogeologi Pada Cekungan Air Tanah
5. Pemetaan Pemanfaatan Air Tanah
6. Sosialisasi dan Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Air Tanah Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
7. Pendataan Eksploitasi Air Tanah
8. Penyusunan Peta Penataan Ruang WIUP Mineral Logam dan Batubara

Program:

1. Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan
2. Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan

Kegiatan:

1. Pembinaan Perijinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara
2. Rekonsiliasi PNBP
3. Penyiapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Program:

1. Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan
2. Pengawasan Energi dan Air Tanah

Kegiatan:

1. Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara
2. Inventarisasi Lahan Terganggu Akibat PETI
3. Pengawasan Produksi Pertambangan
4. Sosialisasi Stop PETI
5. Pengawasan eksplorasi Pertambangan
6. Tim Pengawasan Terpadu Bidang Minerba
7. Pengawasan Ketenagalistrikan, Migas, dan Air Tanah di Kalimantan Tengah

Eselon IV



No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
383	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
384	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	5 dokumen	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
385	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	M4	Nilai Tukar Petani	102	1,075	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
386	Program peningkatan pemaksimalan hasil produksi pertanian/perkebunan	M4	Jumlah hasil produksi pertanian yang dipasarkan (%)	50%	100%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
387	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		Persentase petani menggunakan teknologi pertanian modern (%)	30%	50%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
388	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	M4	Produktivitas tanaman pangan (Kg/ha)	3,626	4,002	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
389	Program pencegahan dan penanganan penyakit tembak		Persentase tembak yang terkena penyakit (%)	10%	5%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
390	Program peningkatan produksi hasil peternakan	M4	Jumlah Produksi Tembak (ton/tahun)	4	5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
391	Program peningkatan pemaksimalan hasil produksi peternakan		Persentase produksi tembak yang dipasarkan (%)	50%	100%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
392	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan		Persentase peternak menggunakan teknologi peternakan modern (%)	25%	50%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
393	Program Penanganan Kawasan Lahan Gambut (PLG)	M7	Luas kawasan lahan gambut yang ditangani (Ha)	200 ha	1.000 ha	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3.04 Kehutanan						
394	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Kehutanan
395	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal	100%	100%	Dinas Kehutanan
396	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparaturnya yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Kehutanan
397	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS		Jumlah PNS yang pindah/purna tugas	3 Orang		Dinas Kehutanan
398	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kompetensi/kuualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Kehutanan
399	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Dinas Kehutanan
400	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Kehutanan
401	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	M7	Persentase pencapaian target produksi hasil hutan (%)	80%	100%	Dinas Kehutanan
402	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	M7	Luas lahan kritis yang direhabilitasi di dalam dan diluar kawasan hutan (Ha)	45.555 ha	45.555 ha	Dinas Kehutanan
403	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	M7	Persentase penyelesaian kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan (%)	80 %	100 %	Dinas Kehutanan
404	Program perencanaan dan pengembangan hutan		Luas pemeliharaan hutan industri dan hutan wisata	4 dokumen	4 dokumen	Dinas Kehutanan
405	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan		Jumlah unit KPH dan Tahura di Kalimantan Tengah	4	4	Dinas Kehutanan
3.05 Energi dan Sumber Daya Mineral						
406	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
407	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal	100%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
408	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparaturnya yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
409	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kompetensi/kuualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Bidang Urusan / Program Prioritas Pembangunan	Type	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja		PERANGKAT DAERAH
				Tahun		
				2016	2021	
1	2	3	4	5	6	7
410	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
411	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	M2	Jumlah SDM bidang ketenagalistrikan mendapat pembinaan (%)	80%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
412	Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pengusahaan Minyak Dan Gas		Jumlah pengusaha minyak dan gas yang mendapat pembinaan (kabupaten)	2	4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
413	Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi		Persentase tingkat kualitas dan akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi (%)	93%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
414	Program Pembinaan Dan Pelayanan Perijinan Pertambangan	M5	Meningkatnya pelayanan perijinan pertambangan (%)	97%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
415	Program Bimbingan Teknis Dan Penyuluhan Wilayah Pertambangan		Persentase Terlaksananya bimbingan teknis dan wilayah pertambangan (%)	100%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
416	Program Pengusahaan Listrik Dan Energi	M2	Persentase terwujudnya pengusahaan listrik dan energi (%)	80%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
417	Program Pengembangan Listrik Dan Pemanfaatan Energi	M2	Rasio elektrifikasi (%)	72,5%	92,5%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
418	Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi		Persentase meningkatnya informasi di bidang geologi (%)	80%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
419	Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium		Persentase terwujudnya Peningkatan Kapasitas Laboratorium (%)	96%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
420	Program Monitoring Dan Evaluasi		Jumlah program yang dimonitoring dan dievaluasi	17	17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
421	Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan		Jumlah GMP yang diterapkan oleh pemegang izin usaha pertambangan	79	554	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
422	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Persentase promosi dan kerjasama investasi (%)	80%	100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.06 Perdagangan						
423	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
424	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal	100%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
425	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparaturnya yang disiplin dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
426	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparaturnya yang memenuhi standar kompetensi/kuualifikasi pada Unit Kerjanya	100%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
427	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		dokumen pengelolaan aset/barang daerah	100%	6 laporan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
428	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Dokumen pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	5 dokumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
429	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	M4	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	1,1%	1,35%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
430	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	M4	Ekspor Bersih Perdagangan (US \$)	1	1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
431	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	M4	Persentase pembinaan kelompok pedagang/usaha informal/Penerbitan SIUP (%)	90%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
432	Program Stabilitas Harga Barang Kebunhan Pokok	M4	Tingkat inflasi yang terkendali (%)	0	3,4%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.07 Perindustrian						
433	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	M4	Cakupan bina kelompok pengrajin/jumlah tenaga kerja (orang)	657 orang	830 orang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
434	Program penumbuhan Industri agro	M4	Persentase pertumbuhan industri agro (%)	70%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.08 Transmigrasi						
435	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Jumlah Transmigrasi swakarsa (KK)	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
436	Program Percepatan Pertumbuhan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	M1	Jumlah kawasan transmigrasi terbangun	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
437	Program pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
438	Pengembangan Masyarakat dan kawasan transmigrasi	M4	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
439	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	M4	Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun	0	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam
Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA
1. Terwujudnya pelayanan masyarakat secara maksimal terhadap pengelolaan sector DESDM	1. Terwujudnya manajemen dan SDM yang profesional	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan organisasi	Meningkatkan Manajemen dan Kompetensi SDM	Persentasi pembinaan pengelolaan pegawai
		2. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan sector ESDM yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan sector ESDM yang efektif dan efisien	Hasil (nilai) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DESDM Provinsi Kalimantan Tengah. Persentase pencapaian Renstra
		3. Administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel	Peningkatan Administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan keuangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
	2. Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan ESDM kepada masyarakat	1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien serta kualitas data dan teknologi informasi sector	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien serta kualitas data dan teknologi informasi sector ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA
		ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu		
		2. Meningkatkan pelayanan komunikasi public sector ESDM	Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan ESDM kepada masyarakat	<p>Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja</p> <p>Persentase Peningkatan Nilai Data ESDM sesuai target</p> <p>Peningkatan jumlah pengunjung situs website DESDM Prov.Kalteng</p>
2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan daerah dari sector energy dan sumber daya mineral	1. Terwujudnya peran penting sector ESDM dalam penerimaan daerah dan pembangunan daerah	1. Mewujudkan peran penting subsector mineral dan batubara dalam penerimaan daerah	Peningkatan peran penting subsector mineral dan batubara dalam penerimaan daerah	Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba
		2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah dari daerah dari sewa alat dan cetak peta
	2. Adanya regulasi sebagai payung hukum untuk menarik pajak dan retribusi daerah dari sector energy dan sumber daya mineral	1. Mengusulkan dasar/ bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Daerah terkait dengan energy dan sumber daya mineral	Pengusulan dasar/ bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Daerah terkait dengan energy dan sumber daya mineral untuk menarik pajak dan retribusi.	Jumlah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Kepala Daerah berkaitan dengan energy dan sumber daya mineral untuk menarik pajak dan retribusi.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA
		untuk menarik pajak dan retribusi.		
3. Terwujudnya peningkatan investor energy dan sumber daya mineral	1. Terwujudnya peningkatan investor energy dan sumber daya mineral	1. Promosi investor sector energy dan sumber daya mineral	Promosi dan kerjasama investor sektor energi dan sumber daya mineral	Jumlah pameran dan kegiatan promosi yang diikuti atau dilaksanakan
4. Terwujudnya ketersediaan energy yang memadai untuk masyarakat dan pembangunan	1. Pembangunan Infrastruktur Energi	1. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Elektrifikasi • Rasio Desa Berlistrik • Penambahan Kapasitas Pembangkit • Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik
	2. Meningkatkan Diversifikasi Energi	1. Pengembangan Pembangkit Listrik dari Sumber EBT	Pengembangan Pembangkit Listrik dari Sumber EBT	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT <ul style="list-style-type: none"> a. PLTMH b. PLT Bayu/Hybrid c. PLTS Tersebar d. PLTS Terpusat
		2. Mendorong pengembangan bioenergy lestari dari bahan bakar nabati dan kotoran ternak (biogas, biofuel dan biomassa)	Pengembangan bioenergy lestari dari bahan bakar nabati dan kotoran ternak (biogas, biofuel dan biomassa)	Kapasitas terpasang PLT Biogas
5. Tersedianya informasi energy dan sumber daya mineral yang	1. Tersedianya data dan informasi energy dan sumber daya mineral yang	1. Pengungkapan potensi energy dan sumber daya mineral Provinsi Kalimantan	Peningkatan kualitas dan akses informasi energy dan sumber daya mineral.	Jumlah wilayah prospek sumber daya mineral dan batubara.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA
berkualitas	berkualitas	Tengah.		Jumlah peta wilayah ijin usaha pertambangan mineral dan batubara
		2. Penyediaan instrument (alat dan bahan) penggalian informasi energy dan sumber daya mineral	Peningkatan kapasitas laboratorium untuk penggalian informasi energi dan sumber daya mineral	Instrumen bahan dan alat penggalian informasi energy dan sumber daya mineral terbaru
6. Tersedianya dan terdistribusinya bahan bakar minyak dan gas keberbagai wilayah di Kalimantan Tengah.	1. Terkoordinasinya sistem pengangkutan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas dengan PT. PERTAMINA (PERSERO) dan operator lainnya yang terintegrasi ke berbagai wilayah di provinsi Kalimantan Tengah.	1. Mengkoordinasikan sistem pengangkutan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas dengan PT. PERTAMINA (PERSERO) dan operator lainnya yang terintegrasi ke berbagai wilayah di provinsi Kalimantan Tengah.	Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perusahaan minyak dan gas bumi.	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur SPBU, APMS, SPBE, Depo BBM dan Gas dan Lembaga penyalur lainnya.
7. Tersinkronisasi nya kebijakan, program dan kegiatan antar pemerintah pusat dan daerah	1. Meningkatkan kerjasama program, kebijakan dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan	1. Pelaksanaan koordinasi melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Peningkatan koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Rapat kerja ESDM yang terlaksana.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA
(provinsi dan kabupaten) terkait energy dan sumber daya mineral	kabupaten terkait energy dan sumber daya mineral.			
8. Terpenuhinya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Mewujudkan pertambangan mineral dan batubara yang baik dan benar (good mining practice)	1. Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	Pembinaan bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara.	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)
	2. Meningkatkan efisiensi pemakaian dan pengelolaan energi	1. Penghematan energi listrik	Audit pemakaian dan pengelolaan energi listrik pada gedung bangunan pemerintah	Jumlah gedung bangunan pemerintah yang menjadi objek audit energi.





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221946 Fax. (0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERMAL SUBHAN, ST. M.T**

Jabatan : **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Apabila target kinerja tidak tercapai maka kami bersedia menerima sanksi dari pimpinan.

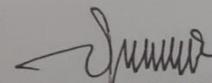
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2019

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,


H. SUGIANTO SABRAN


ERMAL SUBHAN, ST. M.T
NIP. 196902061996031003





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Cilik Riwit Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946 (Fax) 3222984 Kode Pos 73112
Email: distambenprovkalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERMAL SUBHAN, ST, M.T**
Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Tengah
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja (IKU) sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2018

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003



FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Unit SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

2. Tugas dan Fungsi : Urusan di Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

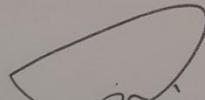
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan energi dan sumber daya mineral;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
- d. Pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. Penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas dalam pelaksanaan tugas melalui diklat teknis, struktural dan fungsional; dan
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah;	Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba;	Jumlah Iuran Tetap Ditambah Iuran Produksi	Dinas ESDM
2.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta;	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Ukuran Peta dikali Tarif• Jenis Fasilitas Pertambangan dikali Tarif	Dinas ESDM Dinas ESDM



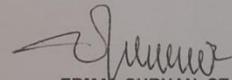
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik; 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah RT/Jumlah RT seluruhnya dikali 100% • Jumlah desa berlistrik / Jumlah desa seluruhnya dikali 100% 	Dinas ESDM Dinas ESDM
4.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT;	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas terpasang PLTS tersebar; • Kapasitas terpasang PLTS terpusat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapsitas terpasang (wp) Jumlah daya masing-masing peralatanxjumlah peralatan (modul) • Kapasita terpasang (wp) = Jumlah daya masing-masing x jumlah peralatan (modul tiap rumah/fasilitas umum) 	Dinas ESDM Dinas ESDM
5.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>);	Jumlah IUP yang memenuhi GMP ((<i>good mining practice</i>))	Dinas ESDM

GOVERNOR OF CENTRAL KALIMANTAN,



H. SUGIANTO SABRAN

HEAD OF THE
ENERGY AND MINERAL RESOURCES
DEPARTMENT OF CENTRAL KALIMANTAN,



ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946 (Fax) 3222984 Kode Pos 73112
Email: distambenprovkalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERMAL SUBHAN, ST, M.T**
Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Tengah
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

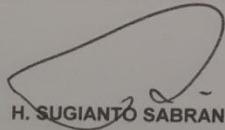
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

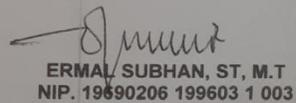
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2018

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


H. SUGIANTO SABRAN


ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Lampiran Kontrak Kinerja Tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Pemerintah/SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran : 2018

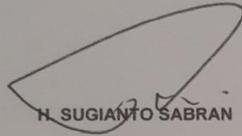
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah;	• Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba;	Milyar Rupiah	150
2.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta;	Juta Rupiah	470
3.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	• Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik;	Persentase (%) Persentase (%)	81,9 89,6
4.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT;	• Kapasitas terpasang PLTS tersebar; • Kapasitas terpasang PLTS terpusat;	Rumah Tangga (RT) Kwp	2.366 535
5.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>)	Persentase (%)	100



NO. (6)	Program (7)	Anggaran (8)
1	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	300.000.000,00
2	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi	250.000.000,00
3	Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Pertambangan	459.890.000,00
4	Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan	124.600.000,00
5	Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi	52.082.899.950,00
6	Peningkatan Informasi Bidang Geologi	618.360.000,00
7	Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan	1.165.500.000,00
8	Program Penataan Wilayah	250.000.000,00
9	Pengawasan Energi dan Air Tanah	100.000.000,00

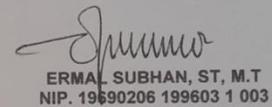
Palangka Raya, Januari 2018

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



H. SUGIANTO SABRAN

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,



ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp. (0536) 3221946, Fak. (0536) 3222984

A. Target Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target Realisasi Kinerja				Ket.
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah;	• Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba;	270 <i>260</i>	Milyar Rupiah	67.500.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000	
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta;	472.000.000	Juta Rupiah	117.999.900	117.999.900	117.999.900	118.000.300	
3.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	• Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik;	84,8 93,1	Persentase (%) Persentase (%)	- -	- -	42,4 46,55	42,4 45,55	
4.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT;	• Kapasitas terpasang PLTS tersebar; • Kapasitas terpasang PLTS terpusat;	2.340 650	Rumah Tangga (RT) Kwp	0 0	0 0	1.170 325	1.170 325	
5.	Meningkatnya kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>);	100 (80 Perusahaan)	Persentase (%)	25 % (20 Perusahaan)	25 % (20 Perusahaan)	25 % (20 Perusahaan)	25 % (20 Perusahaan)	



B. Target Realisasi Keuangan

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Realisasi Keuangan (Rp)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan		86.000.000					
		1. Penyusunan Perda RUED	86.000.000	43.000.100	42.999.999	-	-	
2.	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi		400.000.000					
		1. Survey Karakteristik Geologi Kelautan Kawasan Lepas Pantai	150.000.000	150.000.000	-	-	-	
		2. Survey Potensi Bahan Galian Batuan dan Mineral Non Logam	150.000.000	49.080.000	50.280.000	50.640.000	-	
		3. Penyelidikan Daerah Rawan Bencana Geologi	100.000.000	-	-	100.000.000	-	
3.	Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Pertambangan		210.500.000					
		1. Pembinaan Perijinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara	210.500.000	70.200.000	67.700.000	36.375.000	36.225.000	
4.	Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan		548.350.000					
		1. Penyusunan Peta Penataan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral dan Batubara	105.500.000	37.500.000	37.500.000	30.500.000	-	
			171.150.000	34.230.000	34.230.000	102.690.000	-	
			109.000.000	-	54.500.000	27.250.000	27.250.000	
		2. Penyiapan WPR	62.700.000	62.700.000	-	-	-	
3. Penataan dan Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000	50.000.000	-	-	-			
4. Sosialisasi Kepmen ESDM No.1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas WIUP atau WIUPK OP dan	50.000.000	50.000.000	-	-	-			



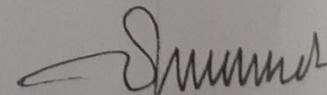
		Permen 41 tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat					
		5. Pembuatan Neraca Sumber Daya Mineral					
		6. Pembuatan Dokumen Permodelan Reklamasi Bahan Galian Batubara					
5.	Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi		18.731.293.435				
		1. Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (Pembangunan PLTS)	12.006.300.000	526.116.100	3.475.859.600	7.987.254.300	17.070.000
		2. Pembangunan Lampu Penerangan Jalan	643.613.900 261.580.000	255.713.900 65.394.900	387.900.000 65.394.900	- 65.394.900	- 65.395.300
		3. Pemeliharaan dan Pembenahan PJU dan JTM	60.000.000	-	30.000.000	30.000.000	-
		4. Rapat dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Bioenergi Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah	5.309.799.535 300.000.000	112.128.535 300.000.000	1.116.750.000 -	4.056.921.000 -	24.000.000 -
		5. Pembangunan PLTS Terpusat Bersumber Dana APBD	150.000.000	150.000.000	-	-	-
		6. Verifikasi Desa Belum Berlistrik untuk mendukung Rasio Elektrifikasi di Kalteng					
		7. Survey Potensi Energi Baru terbarukan					
6.	Peningkatan Informasi Bidang Geologi		1.330.770.000				
		1. Pemetaan Hidrogeologi Pada Cekungan Air Tanah	333.000.000 120.000.000	54.120.000 30.100.000	167.160.000 29.600.000	111.720.000 30.100.000	- 30.200.000
		2. Sosialisasi dan Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Air Tanah Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten	150.000.000 227.770.000 500.000.000	- 88.580.000 63.400.000	105.850.000 87.260.000 281.700.000	44.150.000 51.930.000 154.900.000	- - -
		3. Penetapan dan Pendataan Zonasi Air Tanah					
		4. Pendataan Eksploitasi Air Tanah					
		5. Pendukung Lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)					
7.	Pengawasan dan Evaluasi		1.880.660.000				



Pertambangan							
	1. Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara	315.500.000	106.950.000	58.400.000	101.400.000	48.750.000	
		100.000.000	15.840.000	33.360.000	35.320.000	15.480.000	
	2. Inventarisasi Lahan Terganggu Akibat PETI	300.000.000	72.200.000	66.730.000	92.560.000	68.510.000	
		214.300.000	97.640.000	70.840.000	45.820.000	-	
	3. Pengawasan Produksi Pertambangan	205.940.000	47.840.000	61.630.000	57.550.000	38.920.000	
		500.000.000	86.800.000	155.590.000	207.210.000	50.400.000	
	4. Sosialisasi Stop PETI	244.920.000	47.100.000	90.086.000	47.450.000	60.284.000	
	5. Pengawasan eksplorasi Pertambangan						
	6. Tim Pengawasan Terpadu Bidang Minerba						
	7. Pengawasan Reklamasi Tambang						
8.	Pengawasan Energi dan Air Tanah	500.000.000					
	1. Pengawasan Ketenagalistrikan, Migas dan Air Tanah di Kalimantan Tengah	325.000.000	139.940.000	77.660.000	77.400.000	30.000.000	
		125.000.000	-	44.150.000	73.650.000	7.200.000	
	2. Inspeksi Teknis Ketenagalistrikan	50.000.000	-	13.700.000	-	36.300.000	
	3. Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pengawasan Ketenagalistrikan Migas dan Air Tanah						
9.	Program Rekon Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Rekon Produksi Minerba	607.100.000					
	1. Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rekon Produksi Minerba	307.100.000	69.449.000	95.453.000	75.641.000	66.557.000	
		300.000.000	45.570.000	91.645.000	71.140.000	91.645.000	
	2. Rekonsiliasi Perijinan Bidang Minerba						

Palangka Raya, Januari 2019

KEPALA DINAS,



ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003



LAMPIRAN



LAPORAN KINERJA TRIW I

LAPORAN KINERJA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Capaian triwulan I			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah;	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba; 	Milyar Rupiah	270	67.500.000	63,459,040	94,01	Realisasi PNBPN pada Triwulan I mencapai target
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta;	Juta Rupiah	472.000.000	117.999.900	249,578,000	211,51	Realisasi PAD pada Triwulan I melebihi target.
3.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	<ul style="list-style-type: none"> Rasio elektrifikasi; Rasio desa berlistrik; 	Persentase (%) Persentase (%)	84,8	84,8	85,88	101,27	Capaian Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik pada Triwulan I mencapai target.
				93,1	93,1	88,61	95,18	
4.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT;	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas terpasang PLTS tersebar; Kapasitas terpasang PLTS terpusat; 	Rumah Tangga (RT) Kwp	2.340	-	-	-
				650	-	-	-	
5.	Meningkatnya kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>);	Persentase (%)	100 (80 Perusahaan)	25 % (20 Perusahaan)	20 Perusahaan	100	Capaian realisasi pada Triwulan I sesuai target tercapai 20 Perusahaan.



LAPORAN KEUANGAN PENUNJANG KINERJA

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan		86.000.000				
		1. Penyusunan Perda RUED	86.000.000	43.000.100	-	-	Kegiatan ini Dalam Penjadwalan Pembahasan
2.	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi		400.000.000				
		1. Survey Karakteristik Geologi Kelautan Kawasan Lepas Pantai	150.000.000	150.000.000	135.542.600	90.36	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.
		2. Survey Potensi Bahan Galian Batuan dan Mineral Non Logam	150.000.000	49.080.000	29.500.000	60.11	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.
		3. Penyelidikan Daerah Rawan Bencana Geologi	100.000.000	-	-	-	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III. •
3.	Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Pertambangan		210.500.000				
		1. Pembinaan Perijinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara	210.500.000	70.200.000	32,630,00	46.48	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.
4.	Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan		548.350.000				



		1. Penyusunan Peta Penataan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral dan Batubara	105.500.000	37.500.000	25,100,000	66,93	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I. Sudah terlaksana 2 kegiatan, Kab. Babel dan Kapuas
		2. Penyiapan WPR	171.150.000		-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II, III, IV.
		3. Penataan dan Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan.	109.000.000	34.230.000	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II, III, IV.
		4. Sosialisasi Kepmen ESDM No. 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas WIUP atau WIUPK OP dan Permen 41 tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat.	62.700.000	62.700.000	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.
		5. Pembuatan Neraca Sumber Daya Mineral	50.000.000	50.000.000	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I. Tahap Persetujuan Kontrak Kerjasama.
		6. Pembuatan Dokumen Permodelan Reklamasi Bahan Galian Batubara	50.000.000	50.000.000	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I. Tahap Persetujuan Kontrak Kerjasama
5.	Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi		18.731.293.435				
		1. Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (Pembangunan PLTS)	12.006.300.000	526.116.100	59.377.430	11,29	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I. Persiapan Lelang.
		2. Pembangunan Lampu Penerangan Jalan	643.613.900	255.713.900	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I. Persiapan Lelang.
		3. Pemeliharaan dan Pembenahan PJU dan JTM	261.580.000	65.394.900	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini belum dilaksanakan pada triwulan I.
		4. Rapat dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Bioenergi Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah	60.000.000	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II, III.
		5. Pembangunan PLTS Terpusat Bersumber Dana APBD	5.309.799.535	112.128.535	29.950.000	26,71	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.
		6. Verifikasi Desa Belum Berlistrik untuk mendukung Rasio Elektrifikasi di Kalteng	300.000.000	300.000.000	185.430.000	61,81	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.
		7. Survey Potensi Energi Baru terbarukan	150.000.000	150.000.000	34.820.000	23,21	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I. Persiapan Lelang.



6.	Peningkatan Informasi Bidang Geologi		1.330.770.000				
		1. Pemetaan Hidrogeologi Pada Cekungan Air Tanah	333.000.000	54.120.000	47.910.000	88,53	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.
		2. Sosialisasi dan Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Air Tanah Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten	120.000.000	30.100.000	25.000.000	83,05	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.
		3. Penetapan dan Pendataan Zonasi Air Tanah	150.000.000	-	-	-	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II dan III.
		4. Pendataan Eksploitasi Air Tanah	227.770.000	88.580.000	82.310.000	92,92	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.
		5. Pendukung Lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)	500.000.000	63.400.000	45.695.800	72,08	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.
7.	Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan		1.880.660.000				
		1. Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara	315.500.000	106.950.000	42.100.000	39,36	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I. ada 2 Kabupaten (Kab. Mura dan Kab. Bartim).
		2. Inventarisasi Lahan Terganggu Akibat PETI	100.000.000	15.840.000	15.160.000	95,70	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I. Kabupaten. Pulpis.
		3. Pengawasan Produksi Pertambangan	300.000.000	72.200.000	58.270.000	80,70	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.3 Kabupaten (Kab. Bartim, Kab. Barut dan Kab. Barseh).
		4. Sosialisasi Stop PETI	214.300.000	97.640.000	81.820.000	83,79	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.4 Kabupaten (Kab. Pulpis, Kab. Sukamara Kab. Mura dan Kab. Katingan).
		5. Pengawasan eksplorasi Pertambangan	205.940.000	47.840.000	46.870.000	97,97	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.2 Kabupaten (Kab. Mura dan Kab. Barut).
		6. Tim Pengawasan Terpadu Bidang Minerba.	500.000.000	86.800.000	-	-	• Kegiatan ini belum dilaksanakan pada triwulan I.
		7. Pengawasan Reklamasi Tambang	244.920.000	47.100.000	17.370.000	36,87	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I. Kab. Katingan
8.	Pengawasan Energi dan Air Tanah		500.000.000				
		1. Pengawasan Ketenagalistrikan, Migas dan Air Tanah di Kalimantan Tengah	325.000.000	139.940.000	84.620.000	63,15	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.4 Kabupaten (Kab. Mura, Kab. Kotim, Kab. Barut dan Kab. Pulpis)
		2. Inspeksi Teknis Ketenagalistrikan	125.000.000	-	-	-	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I, II dan III.
		3. Koordinasi dan Konsultasi	50.000.000	-	-	-	• Kegiatan ini dilaksanakan pada



9.	Program Rekon Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Rekon Produksi Minerba		607.100.000				
		1. Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rekon Produksi Minerba	307.100.000	69.449.000	34,320,000	49.42	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I.
		2. Rekonsiliasi Perijinan Bidang Minerba	300.000.000	45.570.000	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini belum dilaksanakan pada triwulan I.



LAPORAN TRIWULAN II

LAPORAN KINERJA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Capaian triwulan II			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah;	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba; 	Milyar Rupiah	260	65.000.000.000	67.330.038.992	103,59	Realisasi PNBP pada Triwulan II melebihi target
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta;	Juta Rupiah	472.000.000	117.999.900	1.443.382.000	305,80	Realisasi PAD pada Triwulan II melebihi target.
3.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	<ul style="list-style-type: none"> Rasio elektrifikasi; Rasio desa berlistrik; 	Persentase (%)	84,8	84,8	85,88	101,27	Capaian Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik pada Triwulan II mencapai target.
			Persentase (%)	93,1	93,1	88,61	95,18	
4.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT;	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas terpasang PLTS tersebar; Kapasitas terpasang PLTS terpusat; 	Rumah Tangga (RT)	2.340	-	-	-
			Kwp	650	-	-	-	
5.	Meningkatnya kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>);	Persentase (%)	100 (80 Perusahaan)	25 % (20 Perusahaan)	18 Perusahaan	22,5	Capaian realisasi pada Triwulan II tidak sesuai target karena terkendala libur lebaran.



LAPORAN KEUANGAN PENUNJANG KINERJA

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan		86.000.000				
		1. Penyusunan Perda RUED	86.000.000	42.999.999	-	-	Kegiatan ini Dalam Penjadwalan Pembahasan oleh DPRD Provinsi.
2.	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Mineral dan Batubara, Migas dan Panas Bumi		400.000.000				
		1. Survey Karakteristik Geologi Kelautan Kawasan Lepas Pantai	150.000.000	-	135.542.600	90.37	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
		2. Survey Potensi Bahan Galian Batuan dan Mineral Non Logam	150.000.000	50.280.000	70.690.000	97.14	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
		3. Penyelidikan Daerah Rawan Bencana Geologi	100.000.000	-	-		• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III.
3.	Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Pertambangan		210.500.000				
		1. Pembinaan Perijinan IUP dan IUPK Mineral dan Batubara	210.500.000	67.700.000	101.070.000	48.02	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
4.	Bimbingan Teknis dan Penyiapan Wilayah Pertambangan		548.350.000				



		1. Penyusunan Peta Penataan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral dan Batubara	105.500.000	37.500.000	49,500,000	46.92	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
		2. Penyiapan WPR	171.150.000	34.230.000	24.750.000	14.46	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II,III,IV.
		3. Penataan dan Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan.	109.000.000	54.500.000	45.630.000	49.87	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II,III,IV.
		4. Sosialisasi Kepmen ESDM No.1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas WIUP atau WIUPK OP dan Permen 41 tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat.	62.700.000	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada triwulan I.
		5. Pembuatan Neraca Sumber Daya Mineral	50.000.000	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II. Tahap Persetujuan Kontrak Kerjasama.
		6. Pembuatan Dokumen Permodelan Reklamasi Bahan Galian Batubara	50.000.000	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II. Tahap Persetujuan Kontrak Kerjasama
5.	Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi		18.731.293.435				
		1. Pembangunan Pembangkit dan Jaringan (Pembangunan PLTS)	12.006.300.000	3.475.859.600	116.442.040	969.85	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II. Persiapan Lelang.
		2. Pembangunan Lampu Penerangan Jalan	643.613.900	387.900.000	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II. Persiapan Lelang.
		3. Pemeliharaan dan Pembenahan PJU dan JTM	261.580.000	65.394.900	72.289.194.28	27.64	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini belum dilaksanakan pada triwulan II.
		4. Rapat dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Bioenergi Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah	60.000.000	-	30.000.000	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini belum dilaksanakan pada triwulan II, III.
		5. Pembangunan PLTS Terpusat Bersumber Dana APBD	5.309.799.535	1.116.750.000	29.950.000	564.06,71	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
		6. Verifikasi Desa Belum Berlistrik untuk mendukung Rasio Elektrifikasi di Kalteng	300.000.000	-	221.580.000	73.86	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II
		7. Survey Potensi Energi Baru terbarukan	150.000.000	-	102.650.000	68.44	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.



6.	Peningkatan Informasi Bidang Geologi		1.330.770.000				
		1. Pemetaan Hidrogeologi Pada Cekungan Air Tanah	333.000.000	167.160.000	199.336.000	59.86	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
		2. Sosialisasi dan Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Air Tanah Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten	120.000.000	29.600.000	49.700.000	41.42.05	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
		3. Penetapan dan Pendataan Zonasi Air Tanah	150.000.000	105.850.000	19.701.500	13.14	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II dan III.
		4. Pendataan Eksploitasi Air Tanah	227.770.000	87.260.000	163.280.000	71.69	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
		5. Pendukung Lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)	500.000.000	281.700.000	120.987.400	24.20.	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
7.	Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan		1.880.660.000				
		1. Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara	315.500.00	58.400.000	115.200.000	36,52	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
		2. Inventarisasi Lahan Terganggu Akibat PETI	100.000.000	33.360.000	41.790.000	41.79	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
		3. Pengawasan Produksi Pertambangan	300.000.000	66.730.000	92.920.000	30.08,70	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
		4. Sosialisasi Stop PETI	214.300.000	70.840.000	150.370.000	70.17	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
		5. Pengawasan eksplorasi Pertambangan	205.940.000	61.630.000	103.890.000	50.45	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II..
		6. Tim Pengawasan Terpadu Bidang Minerba.	500.000.000	155.590.000	16.185.000	3.24	• Kegiatan ini belum dilaksanakan pada triwulan II.
		7. Pengawasan Reklamasi Tambang	244.920.000	90.086.000	125.090.000	59,08	• Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.Kab.Katingan



8.	Pengawasan Energi dan Air Tanah		500.000.000				
		1. Pengawasan Ketenagalistrikan, Migas dan Air Tanah di Kalimantan Tengah	325.000.000	77.660.000	216.270.000	66,55	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
		2. Inspeksi Teknis Ketenagalistrikan	125.000.000	44.150.00	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I, II dan III.
		3. Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pengawasan Ketenagalistrikan Migas dan Air Tanah	50.000.000	13.700.000	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I dan IV.
9.	Program Rekon Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Rekon Produksi Minerba		607.100.000				
		1. Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rekon Produksi Minerba	307.100.000	95.453.000	52.825.510	47,21	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan II.
		2. Rekonsiliasi Perijinan Bidang Minerba	300.000.000	91.6450.000	16.518.000	5,51	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ini belum dilaksanakan pada triwulan II.



NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH DESA	JUMLAH RUMAH TANGGA	KELURAHAN/DESA BERLISTRIK		JUMLAH KELURAHAN/DESA BERLISTRIK	JUMLAH KELURAHAN/DESA BELUM BERLISTRIK	RUMAH TANGGA BERLISTRIK		JUMLAH RUMAH TANGGA BERLISTRIK	JUMLAH RUMAH TANGGA BELUM BERLISTRIK	RASIO ELEKTRIFIKASI PLN		RASIO ELEKTRIFIKASI NON PLN		RASIO ELEKTRIFIKASI		RASIO DESA BERLISTRIK	
					PLN	NON-PLN			PLN	NON PLN			%	%	%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16		17	
1	Kab. Sukamara	3	29	16.284	25	6	31	1	12.212	1.609	13.821	2.463	74,99	%	9,88	%	84,87	%	96,88	%
2	Kab. Lamandau	3	85	21.438	42	25	67	21	13.886	5.239	19.125	2.313	64,77	%	24,44	%	89,21	%	76,14	%
3	Kab. Kotawaringin Barat	13	81	77.122	77	13	90	4	63.341	1.677	65.018	12.104	82,13	%	2,17	%	84,31	%	95,74	%
4	Kab. Seruyan	3	97	53.664	56	42	98	2	20.921	4.075	24.996	28.668	38,99	%	7,59	%	46,58	%	98,00	%
5	Kab. Kotawaringin Timur	17	168	118.139	132	38	170	15	94.329	15.467	109.796	8.343	79,85	%	13,09	%	92,94	%	91,89	%
6	Kab. Katingan	7	154	40.949	87	53	140	21	32.876	4.175	37.051	3.898	80,29	%	10,20	%	90,48	%	86,96	%
7	Kab. Gunung Mas	13	114	27.519	60	50	110	17	14.761	3.945	18.706	8.813	53,64	%	14,34	%	67,97	%	86,61	%
8	Kota Palangka Raya	30	0	72.633	30	0	30	0	72.633	0	72.633	0	100,00	%	0,00	%	100,00	%	100,00	%
9	Kab. Pulang Pisau	4	95	32.216	85	13	98	1	29.386	1.764	31.150	1.066	91,22	%	5,48	%	96,69	%	98,99	%
10	Kab. Kapuas	17	214	90.543	170	36	206	25	72.365	4.402	76.767	13.776	79,92	%	4,86	%	84,79	%	89,18	%
11	Kab. Barito Timur	3	100	31.418	97	6	103	0	30.265	565	30.830	588	96,33	%	1,80	%	98,13	%	100,00	%
12	Kab. Barito Selatan	7	86	34.455	56	26	82	11	23.253	6.044	29.297	5.158	67,49	%	17,54	%	85,03	%	88,17	%
13	Kab. Barito Utara	10	93	33.083	64	26	90	13	26.365	3.730	30.095	2.988	79,69	%	11,27	%	90,97	%	87,38	%
14	Kab. Murung Raya	9	116	27.727	40	53	93	32	15.076	8.441	23.517	4.210	54,37	%	30,44	%	84,82	%	74,40	%
	JUMLAH	139	1.432		1.021	387	1.408	163	521.669	61.133	582.802	94.388								
	JUMLAH TOTAL	1.571		677.190	1.408		1.571		582.802		677.190		77,03	%	9,03	%	86,06	%	89,62	%

13 KABUPATEN DAN 1 KOTA WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH, BPS Prov. Kalteng, PLN

SUMBER DATA :

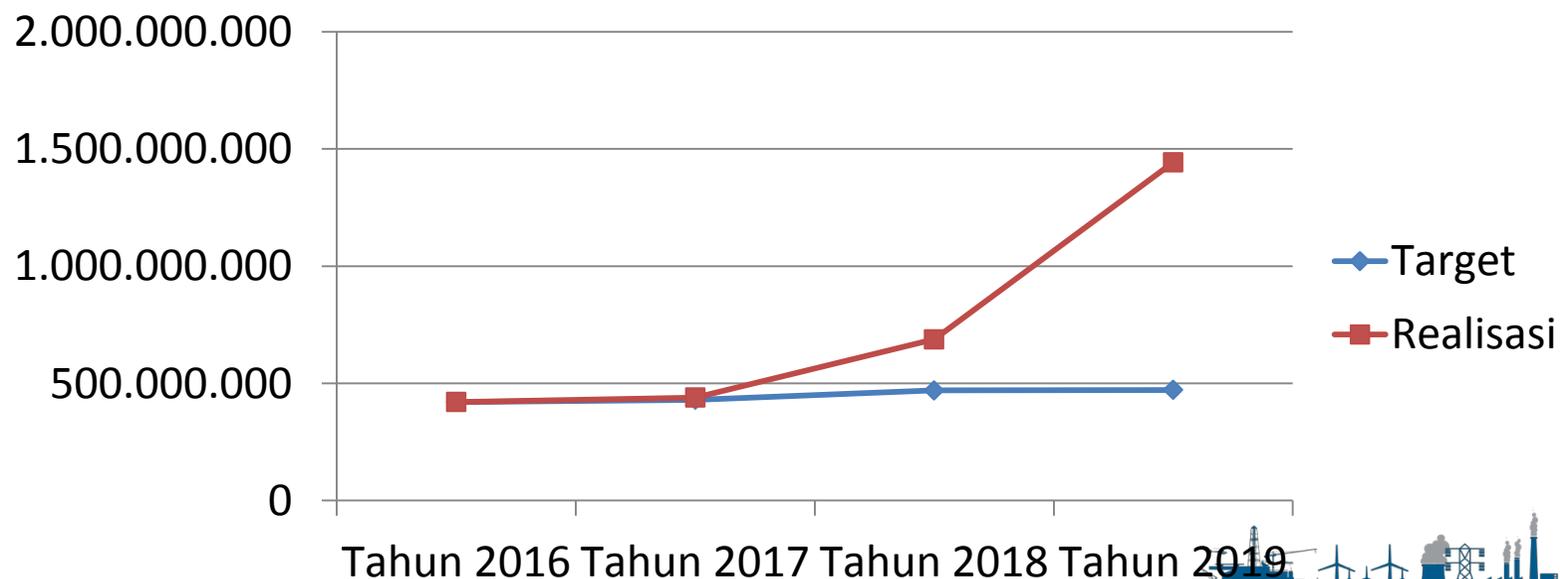
Persero

		Rasio Elektrifikasi PLN	77,03	%
Rasio Desa Berlistrik	89,62 %	Rasio Elektrifikasi Non PLN	9,03	%
		Rasio Elektrifikasi	86,06	%



**PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR ESDM
TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018, DAN TAHUN 2019**

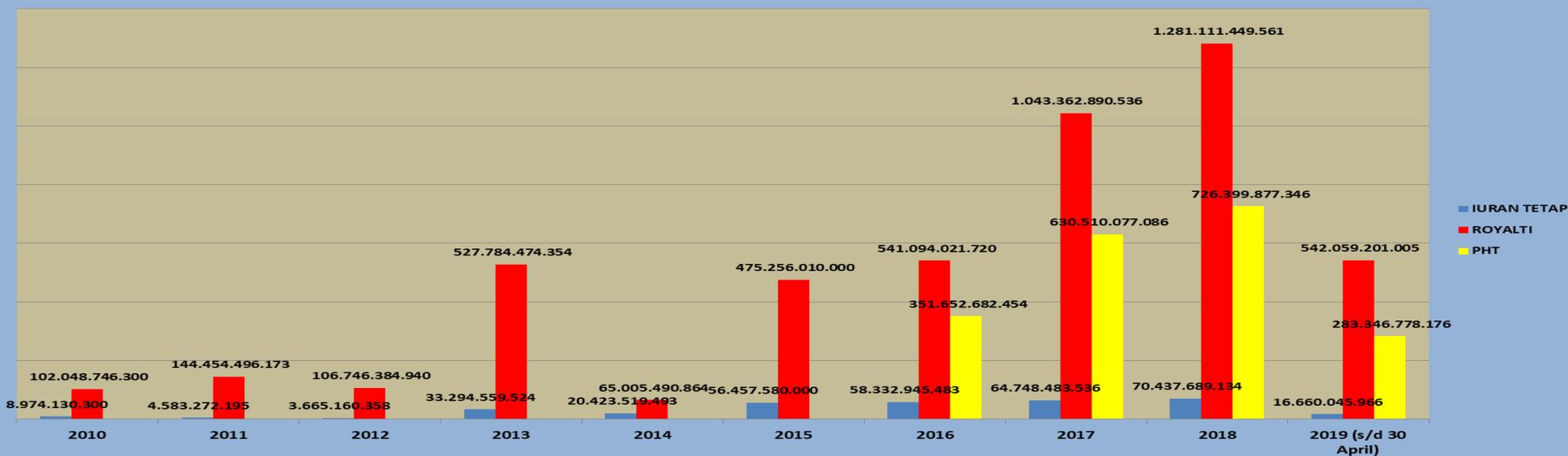
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor ESDM	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Juni Tahun 2019
Target	Rp. 420.000.000,-	Rp. 430.000.000,-	Rp. 470.000.000,-	Rp. 472.000.000,-
Realisasi	Rp. 420.140.000,-	Rp. 439.233.800,-	Rp. 687.805.200,-	Rp. 1.443.382.000,-
Capaian	100,03 %	100,97 %	146,34%	305,80%



**DATA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 s/d 2019 (April)**

No	URAIAN PNBP	2010	2011	2012	2013	2014
1	IURAN TETAP	8.974.130.300	4.583.272.195	3.665.160.358	33.294.559.524	20.423.519.493
2	ROYALTI	102.048.746.300	144.454.496.173	106.746.384.940	527.784.474.354	65.005.490.864
3	PHT					
TOTAL PNBP		111.022.876.600	149.037.768.368	110.411.545.298	561.079.033.878	85.429.010.357

No	URAIAN PNBP	2015	2016	2017	2018	2019 (s/d 30 Juni)
1	IURAN TETAP	56.457.580.000,00	58.332.945.483,00	64.748.483.536,00	70.437.689.134,00	18.449.029.737,00
2	ROYALTI	475.256.010.000,00	541.094.021.720,00	1.043.362.890.536,00	1.281.111.449.561,00	798.982.718.019,00
3	PHT		351.652.682.454,00	630.510.077.086,00	726.399.877.346,00	434.096.807.985,00
TOTAL PNBP		531.713.590.000,00	951.079.649.657	1.738.621.451.158	2.077.949.016.041	1.251.528.555.741,00





TERIMA KASIH.....





GAMBARAN UMUM ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan rencana teknis operasional tentang perubahan birokrasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu lima tahun kedepan yaitu dari tahun 2015-2019. Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk memberikan arah pelaksanaan perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.



GAMBARAN BIROKRASI DESDM

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2015-2019 pada Dinas ESDM telah memasuki tahapan Pemerintahan berbasis Kinerja (performance based bureaucracy) sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan berorientasi pada prinsip efisien, dan ekonomis;
2. Kinerja difokuskan pada upaya untuk mewujudkan hasil (outcomes)
3. Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja; dan
4. Setiap Individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi pada setiap level

Penerapan Pemerintahan berbasis Kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berimplikasi pada pergeseran sasaran Reformasi Birokrasi 2015-2019 adalah

- a. Birokrasi yang bersih dan Akuntabel
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas



TIGA UNSUR REFORMASI BIROKRASI

Capaian reformasi birokrasi sesuai dengan tiga sasaran dimaksud terdapat dalam delapan area perubahan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Dinas ESDM telah melakukan proses reformasi Birokrasi, pada area manajemen perubahan, dengan pembentukan Tim pelaksana reformasi birokrasi, adanya Komitmen, dibentuknya media komunikasi antar personil Dinas ESDM dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat saling mengingatkan dan memberikan masukan bagi perubahan kearah yang lebih baik, sosialisasi budaya kerja, peningkatan kapasitas pegawai dan lain sebagainya. Secara detail perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan DESDM untuk area Manajemen Perubahan adalah sebagai berikut:

a. Telah dibentuknya Tim pelaksana Reformasi

Birokrasi sesuai dengan surat Keputusan Kepala Dinas Nomor :050/038/1.1/2018/DESDM



- b. Telah dilakukan formalisasi Komitmen Pimpinan mendorong reformasi birokrasi dengan menandatangani lembar komitmen reformasi birokrasi.
- c. Terdapat media komunikasi berupa TV, banner, Leaflet atau lainnya untuk mensosialisasikan Reformasi Birokrasi
- d. Komunikasi terbuka dengan staf terlaksana dengan dll);
- f. Telah dikirim Pegawai untuk mengikuti Pendidikan menjadi Inspektur Tambang dan Inspektur Ketenagalistrikan
- g. Telah dikirim Pegawai untuk mengikuti Diklat-diklat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi
- h. Telah dilakukan secara Pemantauan capaian kinerja DESDM dengan Rapat Rutin setiap seminggu sekali
- j. Penerapan Budaya Kerja 6R(ramah, rajin, ringkas,rapi, resik,rawat)

2. Pengawasan

- a. Pada area pengawasan, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan DESDM pengawasan dalam konteks pembinaan sektor untuk pencapaian target sesuai Renstra DESDM
- b. Pemantauan penyampaian LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara kepada para pegawai ASN yang wajib menyampaikan



3. Akuntabilitas

Perkembangan reformasi birokrasi di DESDM pada area Akuntabilitas adalah adanya Komitmen kuat dari Pimpinan dan seluruh personal DESDM untuk memastikan kinerja organisasi di semua level dapat dipertanggungjawabkan dengan baik secara administrasi Pemerintahan, kesesuaian atas target yang direncanakan dan dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat, adanya komitmen Pimpinan ditunjukkan dengan:

- Keterlibatan secara langsung dalam penyusunan Rencana strategis DESDM Tahun 2016-2021
- Kepala Dinas ESDM membuat Perjanjian Kinerja dengan Gubernur setiap awal Tahun
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala
- Pemutakhiran data kinerja telah dilakukan secara berkala
- Penyusunan Laporan keuangan persemester dan tahunan
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Perpres No. 29 tahun 2014 telah berjalan dengan baik (Renstra, LAKIP, Perjanjian Kinerja/PK, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan, Review dan Evaluasi Kinerja) dipublikasi kepada publik melalui Website DESDM.



4 .Kelembagaan

Penataan Kelembagaan sesuai Perda Nomor 4 tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi dan perangkat daerah dan Pergub no 20 tahun 2013, reformasi untuk area Kelembagaan yang telah dilakukan di DESDM antara lain melakukan evaluasi, mengupayakan sinergi, serta memperkuat kelembagaan di DESDM

5. Tatalaksana

Pada area tatalaksana, reformasi yang telah dilakukan terkait dengan penyederhanaan dan peningkatan efisiensi/efektifitas dengan memanfaatkan teknologi informasi , kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan DESDM untuk area tatalaksana adalah sebagai berikut:

- a. Telah disusun Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP)
- b. Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 ,mekanisme pengelolaan dan penyediaan informasi data telah berjalan dan untuk tahun 2018 DESDM mendapat predikat terbaik 1
- c. Telah dilakukan transformasi mode layanan secara bertahap dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari proses menuju perwujudan e-government



6. Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia merupakan elemen yang penting dalam suatu organisasi, pengembangan kompetensi sumber daya manusia menyangkut aspek knowledge, skill dan attitude. Pada area SDM Aparatur, kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan DESDM meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan Pegawai
- b. Penyusunan formasi kebutuhan Pegawai
- c. Pelaksanaan analisis jabatan dan penyusunan peta jabatan
- d. Pengembangan pendidikan dan pelatihan dilakukan setiap tahun
- e. Melaksanakan mutasi pegawai
- f. Penegakan disiplin pegawai telah dilaksanakan melalui pengendalian kehadiran pegawai pertriwulan setiap tahun berjalan
- g. Penyusunan standar kompetensi SDM telah dilakukan , namun perlu dikembangkan lebih detail dan terkait kebutuhan diklat setiap pegawai
- h. Identifikasi kebutuhan diklat telah dilakukan
- i. Pengusulan jabatan fungsional tertentu (JFT) untuk Inspektur
- j. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sudah berjalan yang dilakukan setiap tahun



SURAT KEPUTUSAN

Dalam pelaksanaannya Reformasi Birokrasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan :

Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 050/038/I.1/2018/DESDM



TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BERTUGAS :

1. Menyusun rencana Aksi dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Melaksanakan konsultasi dengan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan para pihak terkait;
3. Melaksanakan rumusan konsep Reformasi Birokrasi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi yang telah ditindaklanjuti



Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah disusun untuk dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan mengacu pada kemampuan dan kondisi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi keinginan dimaksud.

Oleh sebab itu, Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai aspek dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.



Capaian Kinerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Lakip Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai **B (69,86)**;
2. Pemenuhan Kewajiban Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, pejabat tertentu telah diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPK;
3. Mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
4. Transparansi Laporan Keuangan dan Asset;
5. Membuat Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa secara Transparan (online/LPSE).
6. Menyusun Rencana Kebutuhan Pegawai mengacu hasil Anjab dan ABK
7. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka meningkatkan nilai LAKIP.



Peningkatan **kualitas pelayanan publik** yang dicapai :

1. Pembangunan *dalam bidang Kelistrikan yang* Yang dititikberatkan pada aksesibilitas dan peningkatan mutu melalui *Program Kalteng Terang*.
2. Pelaksanaan sosialisasi untuk semua daerah yang ada keterlibatan tentang *Program Bebas Peti*.
3. Pelayanan Perizinan kepada wiraswasta tambang dan masyarakat.
4. Dalam pelayanan Informasi Publik melalui Komisi Informasi mendapat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik I dengan nilai 93,9.



LAMPIRAN



JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS ESDM PROV.KALTENG

HARI	JAM
SENIN sd KAMIS	BUKA : 09.000 – 12.00 ISTIRAHAT : 12.00 – 13.00 BUKA : 13.00 – 15.30
JUMAT	BUKA : 09.000 – 11.00 ISTIRAHAT : 11.00 – 13.00 BUKA : 13.00 – 14.00



RUANG DESK INFORMASI PUBLIK DINAS ESDM PROV.KALTENG



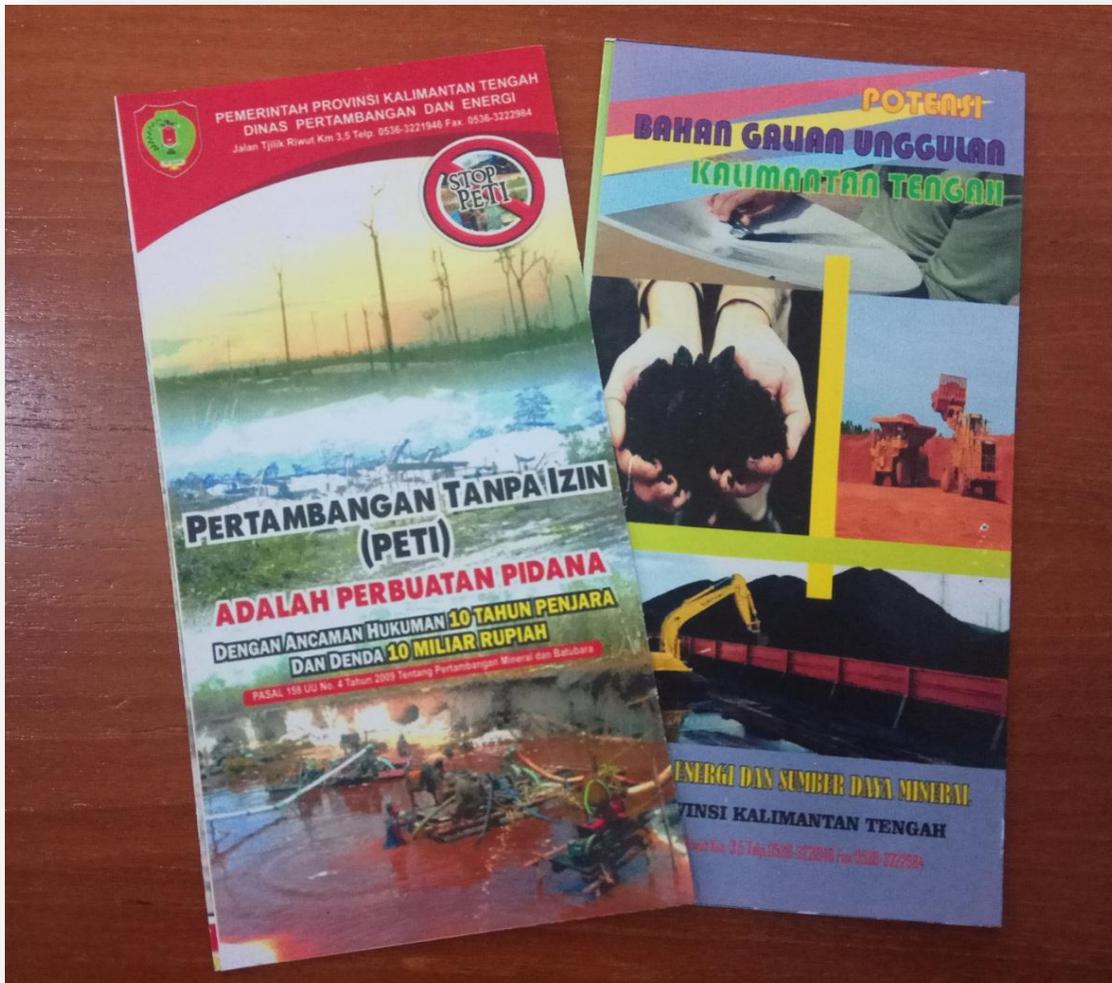
RUANG DESK INFORMASI PUBLIK DINAS ESDM PROV.KALTENG



RUANG TUNGGU PELAYANAN INFORMASI DINAS ESDM PROV.KALTENG



LEAFLET DAN KOTAK SARAN DAN PENGADUAN



Formulir Permintaan Informasi Publik dan Tanda Bukti Penerimaan Informasi Publik



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Jl. CilikRiwut Km. 3,5Telp. (0536) 3221946 (Fax) 3222984KodePos 73112
 Email: distanbuminprovkalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

No : /PPID/DESDM/2018

**FORMULIR
 PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Yang bertandatangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi

NamaPemohonInformasi :
Nomor KTP (sesuai KTP) :

Alamat Pemohon Informasi :
Nomor Telepon :
Email :

Informasi Yang dibutuhkan :

AlasanPermintaan :

Nama Pengguna Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP) :

Alamat Pengguna Informasi :
Nomor Telepon :
Email :

Alasan Pengguna Informasi :

Cara MemperolehInformasi : 1. Langsung. 2 Website. 3 Email. 4 Fax. 5. Via Pos.

Format BahanInformasi : 1. Tercetak; 2. Terekam;

Cara MengirimBahanInformasi : 1. Langsung; 2. ViaPos; 3. Email;

Data Dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
 Palangka Raya 2018
 PemohonInformasi

Materai
6000

.....
NamaJelas&TandaTangan

Catatan :
 1) UU No. 14 Tahun 2008
 Pasal53 :
 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 2) UU No. 14 Tahun 2008
 Pasal54 :
 (1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat (4) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau menyalurkan Informasi yang diklasifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Jl. CilikRiwut Km. 3,5Telp. (0536) 3221946 (Fax) 3222984 KodePos 73112
 Email: distanbuminprovkalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

No : /PPID/DESDM/2018

**TANDA BUKTI
 PENERIMAAN INFORMASI PUBLIK**

Telah Terima Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
 Berupa informasi :

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam
NamaPemohonInformasi :

Alamat :

Palangka Raya.....2018
 PemohonInformasi

MateraiR
p. 6000

.....
 NamaJelas

Catatan :
 1) UU No. 14 Tahun 2008
 Pasal53 :
 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 2) UU No. 14 Tahun 2008
 Pasal54 :
 (1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat (4) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau menyalurkan Informasi yang diklasifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik dan Laporan Harian



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Jl. CilikRiwut Km. 3,5Telp. (0536) 3221946 (Fax) 3222984 KodePos 73112
 Email: dinambenergikalimten@gmail.com
PALANGKA RAYA

No : /PPID/DESDM/2018

TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

TelahTerima Dan PejabatPengelolaInformasi Dan Dokumentasi

Berupainformasi :

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

NamaPemohonInformasi :

Alamat :

Waktu : WIB.....

Palangka Raya,2018

Pemohon Informasi



NamaJelas

- Catatan :
- KE No. 14 Tahun 2008
Pasal10 :
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja Mengungkapkan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyakRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - UU No. 14 Tahun 2008
Pasal14 :
(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam (6) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan dan / atau mengungkapkan Informasi yang dikawatirkan sebagai informasi rahasia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Jl. CilikRiwut Km. 3,5Telp. (0536) 3221946 (Fax) 3222984 KodePos 73112
 Email: dinambenergikalimten@gmail.com
PALANGKA RAYA

LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Hari/Tanggal : 2018

NO	NAMA ALAMAT	PERMINTAAN INFORMASI	JENIS INFORMASI				TINDAK LANJUT
			BER-KALA	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	DIKE-CUALIKAN	

Mengetahui,
Kepala DESDM
SelakuAtasan PPID Pembantu

ERMAL SUBHAN, ST., MT
NIP. 19660503 199303 1 007

Palangka Raya,2018

Sekretaris,
Selaku PPID Pembantu

Drs. HARYO ISRAMANTO
NIP. 19610512 198603 1 015



Laporan Mingguan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl. CilikRiwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946 (Fax) 3222984 KodePos 73112
Email: dinastambesumberdalmteny@gmail.com
PALANGKA RAYA

LAPORAN MINGGUAN/BULANAN
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Minggu: 2018

NO	TANGGAL & WAKTU			NAMA & ALAMAT	PERMINTAAN INFORMASI	JENIS INFORMASI				KETERANGAN
	Minta	Jawab/ Seseuai	Waktu (Hari)			BER-KALA	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	DIKE-CUALIKAN	

Palangka Raya,2018

Mengetahui,
Kepala DESDM
Selaku/Atasan PPID Pembantu

Sekretaris,
Selaku PPID Pembantu

ERMAL SUBHAN, ST., M.T
NIP. 19660503 199303 1 007

Drs. HARYO ISRAMANTO
NIP. 19610512 198603 1 015



Visi, Misi dan Maklumat Pelayanan Dinas



Kotak Saran Dan Pengaduan



Videotron sebagai salah satu perlengkapan PPID Pembantu



WEBSITE PPID DESDM

<http://ppid.kalteng.go.id>
esdm@ppid.kalteng.go.id



NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI	PENERBIT	ACTION
1	NERACA	Laporan Keuangan	Berkala	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 22 July 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link
2	LO	Laporan Keuangan	Berkala	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 22 July 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link
3	CaLK 2018	Laporan Keuangan	Berkala	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 22 July 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link
4	Asset 2018	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 22 July 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link
5	SOP Minerba	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 23 May 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link
6	Data Pengusahaan Listrik	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 23 May 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link
7	Aset 2018	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 23 May 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link
8	Foto Informasi	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 22 May 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link
9	IKU 2018	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 22 May 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link
10	IKU 2019	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 22 May 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link



SERTIFIKAT PENGHARGAAN PPID



VISITASI PADA DESDM PROV.KALTENG



VISITASI PADA DESDM PROV.KALTENG



MAHASISWA DARI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI



SATPOL PAMONG PRAJA MEMINTA INFORMASI TENTANG LAPORAN PPID



REKON PPID DI HOTEL AQUARIUS





TERIMA KASIH.....

